

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026. PENDAPAT UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TERHADAP RANCANGAN APBD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2027

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai struktur pendapatan RAPBD 2027 yang masih didominasi transfer sebesar 80,68 persen menunjukkan belum adanya lompatan berarti dalam kemandirian fiskal dan meminta strategi konkret serta terukur untuk meningkatkan PAD. Fraksi juga mengingatkan bahwa pendapatan transfer masih menggunakan asumsi karena rincian APBN 2027 belum ditetapkan, sehingga Pemerintah Daerah perlu menyiapkan mitigasi apabila alokasi yang diterima lebih rendah agar penyesuaian anggaran tidak mengorbankan program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat. Adanya perbedaan angka pada beberapa pos belanja dalam dokumen RAPBD juga diminta dijelaskan untuk menjaga transparansi pembahasan anggaran.

Terhadap defisit Rp75,228 miliar yang sebagian besar ditutup menggunakan asumsi SiLPA 2026 sebesar Rp109,672 miliar, Fraksi meminta Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan yang konservatif karena nilai SiLPA sebenarnya baru diketahui setelah pelaksanaan APBD 2026 diaudit. Penyesuaian pendapatan transfer nantinya juga diminta disampaikan secara transparan kepada DPRD tanpa mengubah esensi program prioritas yang telah disepakati dalam KUA-PPAS. Fraksi menegaskan akan mengawal alokasi yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, infrastruktur perdesaan, dan penanggulangan kemiskinan agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Catatan:

- Pendapat Umum disampaikan dalam rangka pembahasan Raperda Kabupaten Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
- Dokumen ditandatangani oleh Solichudin selaku Ketua Fraksi dan Saiful Anwar selaku Sekretaris Fraksi.
- Dokumen terdiri atas 8 halaman.

Tag/Keyword: Pandangan Umum Fraksi; Partai NasDem; RAPBD 2027; APBD Kabupaten Kebumen; Kemandirian Fiskal; PAD; DAK Fisik; Infrastruktur; Pelayanan Dasar; Pariwisata; Geopark; Kemiskinan

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2026. GENERAL OPINION OF THE PARTAI KEBANGKITAN BANGSA FACTION ON THE DRAFT REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF KEBUMEN REGENCY FOR FISCAL YEAR 2027

The Partai Kebangkitan Bangsa Faction considers the 2027 RAPBD revenue structure, with transfer revenue accounting for 80.68 percent, as indicating no significant progress in regional fiscal independence and calls for concrete and measurable strategies to increase Regional Own-Source Revenue (PAD). The Faction also notes that transfer revenue remains assumption-based because the detailed 2027 State Budget allocations have not yet been determined, and therefore calls for risk-mitigation measures should actual transfers fall below projections, particularly to prevent cuts to priority programs that directly affect the community. Differences in several expenditure figures within the RAPBD documents are also requested to be clarified to ensure transparency in the budget deliberation process.

Regarding the IDR 75.228 billion deficit, which relies substantially on a projected IDR 109.672 billion SiLPA for 2026, the Faction calls for a conservative approach because the actual SiLPA can only be determined after the 2026 APBD has been audited. Any subsequent adjustment to transfer revenue should also be transparently communicated to the DPRD without altering the substance of priority programs agreed upon in the KUA-PPAS. The Faction emphasizes its commitment to closely oversee budget allocations directly related to basic services, rural infrastructure, and poverty alleviation to ensure transparent and accountable implementation with tangible benefits for the community.

Note:

- *The General Opinion was presented as part of the deliberation of the Kebumen Regency Draft APBD for Fiscal Year 2027.*
- *The document is dated September 10, 2026, in Kebumen.*
- *The document was signed by Solichudin, Chair of the Faction, and Saiful Anwar, Secretary of the Faction.*
- *The document consists of 8 pages.*

Keywords: *General Opinion; Partai Kebangkitan Bangsa; PKB; 2027 Draft APBD; Fiscal Independence; Transfer Revenue; SiLPA; Budget Deficit; Basic Services; Rural Infrastructure; Poverty Alleviation*